

IKHTISAR LHKPN a.n ORLANDO
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2021)
NIK 1971012608800001

1. DATA PRIBADI

Nama	: ORLANDO
NIK	: 1971012608800001
No KK	: 1971011403081301
NPWP	: 476484357304000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: TANJUNG PANDAN/26 Agustus 1980
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: Perumahan Pondok Indah Melati Jl.Sinar Gg.safir Biru IV B7/14 Air Itam Bukit Intan Pangkalpinang, BUKIT INTAN, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor Handphone	: 081377851818
Email	: northorlando26@gmail.com
NHK	: 621896
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jabatan	: KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Tanggal Lapo	: 31 Desember 2021
Tanggal Kirim	: 20 Januari 2022
Status	: Proses Verifikasi

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: MALARANTINA
Jabatan	: KEPALA SEKSI REHABILITASI - UPTD PANTI SOSIAL BINA LARAS HIJRAH - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah

Yth. Sdr **SUSI HERLINA**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: SUSI HERLINA
Jabatan	: KEPALA SEKSI PENATAAN DESA - BIDANG PEMERINTAHAN DESA - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

KOMISI PEMERINTAHAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA



Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : ANGGIA PUSPIRA ANGGRAIKA
Jabatan : KEPALA SEKSI KEUANGAN DAN ASET
DESA - BIDANG PEMERINTAHAN
DESA - DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
**Tanggal /
Tahun
Pelaporan** : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara



**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : RUMIYANTO

Jabatan : KEPALA SEKSI REHABILITASI
SOSIAL ANAK TERLANTAR -
UPTD PANTI SOSIAL BINA
SERUMPUN - DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

Bidang : EKSEKUTIF
PEMERINTAH PROVINSI

Lembaga : KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

**Tanggal /
Tahun
Pelaporan** : 31 Desember 2021

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama

: NURUL HUDA

Tempat/Tanggal Lahir

: PANGKALPINANG / 8 Oktober 1973

Nomor KTP/NIK

: 1971055008730001

Alamat

: MELANGIR NO. 2 RT.012/003, BUKIT MERAPIN, GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/ atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak dilandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



*) Corret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



(NURUL HUDA)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama (sesuai dengan KTP) : M. RIDWAN
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKALPINANG / 16 September 1973
Nomor KTP/NIK : 1971051609730001
Alamat : JL. BUKIT MANGGIS GG. VANILA BUKIT BARU ATAS RT.010/003, Kelurahan TAMAN BUNGA, Kecamatan GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhingga sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



14-January-2022
Pemberi Kuasa,

(M. RIDWAN)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : TIARA NABILA
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKALPINANG / 14 Oktober 2003
Nomor KTP/NIK : 1971055408030002
Alamat : JL. BUKIT MANGGIS GG. VANILA BUKIT BARU ATAS RT.010/003, Kelurahan TAMAN BUNGA, Kecamatan GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan

Selubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.

14-January-2022
Pemberi Kuasa,



(TIARA NABILA)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



**KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA**

Atas Nama : HARDADI
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA - BIDANG
KELEMBAGAAN, KERJA SAMA,
Jabatan : PEMBANGUNAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -
DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**Tanggal / Tahun
Pelaporan** : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang distafek secara

Yth, Sdr NURUL HUDA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NURUL HUDA
Jabatan : KEPALA BIDANG - BIDANG KELEMBAGAAN, KERJA SAMA, PEMBANGUNAN
Bidang : DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DINAS SOSIAL DAN
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : EKSEKUTIF
: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Dipindai dengan CamScanner

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198

no yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih
ndaftaran dan Pemeriksaan LHKPN



YULI ASTUTI <yastuti.5391@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>

To: yastuti.5391@gmail.com

Wed, Jan 26, 2022 at 8:08 AM

Yth. Sdr YULI ASTUTI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : YULI ASTUTI
Jabatan : KEPALA SEKSI FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - BIDANG PEMERINTAHAN DESA - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : YUSANDRI

Tempat/Tanggal Lahir : CUPAT / 26 Januari 1975

Nomor KTP/NIK : 1971012601750001

Alamat

: Komplek Sampur gg. safir biru XVI no 604, Kelurahan SINAR BULAN, Kecamatan BUKIT INTAN, Kabupaten/Kota KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan. 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



13-January-2022
Pemberi Kuasa,



(YUSANDRI)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

IKHTISAR LHKPN a.n RUMIYANTO
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Awal Menjabat) – 2021)
NIK 1971031108770001

1. DATA PRIBADI

Nama	: RUMIYANTO
NIK	: 1971031108770001
No KK	: 1971030704110007
NPWP	: 48.015.894.8.304.000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: PANGKALPINANG/11 Agustus 1977
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: Jl. Kamboja, Gang Puyuh 2, Kec. Gerunggang, RT.05 RW.02 No. 162A, Kel. Kacang Pedang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor Handphone	: 085267688575
Email	: rumei.online@gmail.com
NHK	: 485988
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jabatan	: KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR - UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Tanggal Laporan	: 31 Desember 2021
Tanggal Kirim	: 23 Januari 2022
Status	: Proses Verifikasi

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : RUMIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKALPINANG / 11 Agustus 1977
Nomor KTP/NIK : 1971031108770001
Alamat : Jl. Kamboja, Gang Puyuh 2, Kec. Gerunggang, RT.05 RW.02 No. 162A, Kel. Kacang Pedang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KACANG PEDANG, GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/ atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



*) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah



20-January-2022
Pemberi Kuasa,

(RUMIYANTO)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : _____

Nama (sesuai dengan KTP)

: SITI NURBAYA

Tempat/Tanggal Lahir

: PANGKALPINANG / 15 Juli 1976

Nomor KTP/NIK

: 1971035507760003

Alamat

: Jl. Kamboja, Gg. Puyuh 2, RT.05 RW.02 No. 162A, Kel. Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). _____

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: _____

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). _____

K H U S U _____

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: _____

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: _____
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: _____
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____

Surat Kuasa ini berlaku sejak diandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. _____



23-January-2022
Pemberi Kuasa,



(SITI NURBAYA)

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

Yth. Sdr **RUMIYANTO**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: RUMIYANTO
Jabatan	: KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK TERLANTAR - UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 31 Desember 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpnp@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpnp.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: muhamadakib@yahoo.com

Tanggal: Senin, 17 Januari 2022 17.30 WIB



Gambar eksternal sekarang lebih aman, dan ditampilkan secara default. [Ubah di Pengaturan](#)

Yth. Sdr MUHAMAD AKIB

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: MUHAMAD AKIB
Jabatan	: KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan

IKHTISAR LHKPN a.n TAUFIK
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2021)
NIK 1901012711680006

1. DATA PRIBADI

Nama	: TAUFIK
NIK	: 1901012711680006
No KK	: 1901012112075372
NPWP	: 146463591315000
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: MENTOK/27 November 1968
Status Nikah	: Menikah
Agama	: ISLAM
Alamat	: KOMP PRUMNAS PEMDA BLOK 4C JLN CENDANA II NO 17 SUNGAILIAT, SUNGAILIAT, BANGKA, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor Handphone	: 082138224561
Email	: taufikdjochar@gmail.com
NHK	: 627460
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jabatan	: KEPALA UPTD - UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Tanggal Laporan	: 31 Desember 2021
Tanggal Kirim	: -
Status	: Draft



IKHTISAR LHKPN a.n TAKDIR ALAMSYAHBANA

(Jenis Laporan - Tahun: Periode – 2021)

NIK 1971011710710002

1. DATA PRIBADI

Nama	:	TAKDIR ALAMSYAHBANA
NIK	:	1971011710710002
No KK	:	1971010709090003
NPWP	:	146644455304000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	PANGKALPINANG/17 Oktober 1971
Status Nikah	:	Menikah
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	Jl. Gandaria I Rt. 07/03 Kel. Air Kepala Tujuh Gerunggang Pangkalpinang Kep. Babel,, GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Nomor Handphone	:	081368488353
Email	:	bibaalbes@gmail.com
NHK	:	690012
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jabatan	:	KEPALA SEKSI REHABILITASI DISABILITAS DAN LANJUT USIA - UPTD PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Tanggal Laporan	:	31 Desember 2021
Tanggal Kirim	:	22 Januari 2022
Status	:	Proses Verifikasi



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Seti
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA N**

Atas Nama	: FIRMANSYAH
	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ADVOKASI SOSIAL - UPTD PANT
Jabatan	: SOSIAL BINA LARAS HIJRAH - D SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Kotak Masuk

**Aplikasi e-
LHKPN <statistik@kpk.go.id>**
kepada saya

Sen, 17 Jan 16.45 (19 jam yang lalu)

Yth. Sdr SHOUMAR DHANI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	: SHOUMAR DHANI
Jabatan	: KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN PENGELOLAAN FAKIR MISKIN - BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

Atas Nama : HENNY YULIANA
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGANGKATAN
ANAK - BIDANG PERLINDUNGAN,
JAMINAN SOSIAL DAN
PENANGANAN BENCANA - DINAS
SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun : 2021
Pelaporan

Email konfirmasi! Lembar Penyerahan LHKPN ini
bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda



subbaguum <subbaguumdinsosmd@gmail.com>

Fw: Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1 pesan

Dhefos Dhefos <dhefos31@yahoo.com> 13 Januari 2022 10.24

Kepada: "subbaguumdinsosmd@gmail.com" <subbaguumdinsosmd@gmail.com>

----- Forwarded Message -----

From: Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id>
To: "dhefos31@yahoo.com" <dhefos31@yahoo.com>
Sent: Wednesday, January 12, 2022, 05:58:51 PM GMT+7
Subject: Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Yth. Sdr DENNY EFANDHONA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : DENNY EFANDHONA
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM - SEKRETARIAT - DINAS SOSIAL DAN
Bidang : EKSEKUTIF
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun : 2021
Pelaporan

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Tertampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn@kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: pancaindrawan98@yahoo.co.id

Tanggal: Rabu, 12 Januari 2022 12.43 WIB

Yth. Sdr PANCA INDRAMAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama	:	PANCA INDRAMAN
Jabatan	:	KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN - BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	:	2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn@kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju. Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama (sesuai dengan KTP) : FADEL MUHAMMAD ALGHAZALI
Tempat/Tanggal Lahir : SUNGAILIAT / 24 Juni 2004
Nomor KTP/NIK : 1901052406040001
Alamat : Jl. Perumnas UPTD No. 3 Tipe 45 No. 3 Karya Makmur Kec. Pemali, Kab. Bangka, Kelurahan KARYA MAKMUR,
Kecamatan PEMALI, Kabupaten Kota BANGKA, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKP"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:

- a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- b. Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
- c. Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/atau laporan setiap akhir tahun (bank asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



12-January-2022
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(FADEL MUHAMMAD ALGHAZALI)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini : -----

Nama (sesuai dengan KTP) : LAILATUN NABILA IHSAN
Tempat/Tanggal Lahir : PANGKALPINANG / 1 Oktober 2004
Nomor KTP/NIK : 1971054110040001
Alamat : Jalan Puyuh II No. 136 RT. 08/02 Perumnas Bukit Merapin Pangkalpinang, Kelurahan BUKIT MERAPIN, Kecamatan GERUNGANG, KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa"). -----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: -----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"). -----

K H U S U S -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: -----

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada: -----

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintahan yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: -----

- Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
- Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintahan yang terkait efek;
- Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa. -----



11-January-2022
Pemberi Kuasa,



Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(LAILATUN NABILA IHSAN)

Yth. Sdr **SISKA ARABIANI**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama	: SISKA ARABIANI
Jabatan	: KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN KELEMBAGAAN DESA - BIDANG KELEMBAGAAN, KERJA SAMA, PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang	: EKSEKUTIF
Lembaga	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tanggal / Tahun Pelaporan	: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **MACHDALENA**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MACHDALENA
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA - BIDANG KELEMBAGAAN, KERJA SAMA, PEMBANGUNAN DESA DAN
Bidang : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Lembaga : EKSEKUTIF
Tanggal / Tahun Pelaporan : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN **198**